

JURNAL

**KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

J. Kebijakan Sosial Ekonomi KP	Vol. 9	No. 2	Hal. 79 - 170	Jakarta Desember 2019	ISSN 2089-6980
--------------------------------	--------	-------	---------------	--------------------------	-------------------

Terakreditasi RISTEKDIKTI : **30/E/KPT/2018**

Diterbitkan bersama :



Balai Besar Riset Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan



Jaringan Riset Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Volume 9 Nomor 2, Desember 2019

Penanggung Jawab :

Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Dewan Redaksi :

Ketua:

Prof. Dr. Sonny Koeshendrajana (*Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*)

Anggota:

Prof. Dr. Agus Heri Purnomo (*Ekonomi Sumber Daya*)

Dr. Armen Zulham (*Sistem Usaha Perikanan*)

Dr. Asep Agus Handaka (*Sosial Ekonomi Perikanan*)

Drs. Masyhuri Imron, MA (*Sosiologi*)

Redaksi Pelaksana :

Sinta Nurwijayanti, S. Pi, M. SE., M.A

Dr. Irwan Muliawan

Hakim Miftahul Huda, M.Si

Nila Mustika Wati, S.S

Edwin Yulia Setyawan, S.T

Rahadi Susetyo Friendly Muhammad, S. Ikom

Desain dan Tata Letak :

Ilham Ferbiansyah, S. Kom

Alamat Redaksi :

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Gedung BRSDM KP Lt. 3

Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara

Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924

Email: pt.losek@gmail.com

Jurnal Online: <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat RahmatNya telah diselesaikan Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Volume 9 Nomor 2 Tahun 2019. Jurnal ini telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan Nomor Akreditasi 30/E/KPT/2018. Jurnal ini merupakan pengembangan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yg diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, maka sejak tanggal 30 Maret 2017 terjadi perubahan nama nomenklatur organisasi dari Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan menjadi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Penerbitan jurnal ini didanai oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Informasi yang ditampilkan meliputi: (i) Perencanaan Model dan Strategi Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak di Kabupaten Biak Numfor, Papua; (ii) Efektivitas Zonasi Dalam Pengelolaan Perikanan Karang di Kawasan Konservasi Perairan Selat Dampier, Raja Ampat; (iii) Strategi Pengembangan Industri Perikanan Tangkap di Kabupaten Buton Selatan; (iv) Kontribusi *Payment For Environment Services* (PES) Terhadap Keberlanjutan Wisata Selam di Kawasan Konservasi Laut Gili Matra; (v) Evaluasi Sistem Budidaya Lele: Aspek Produksi dan Sistem Pengembangannya (Studi Kasus: Pembudidaya Lele Kabupaten Tangerang); (vi) Kajian Hukum Kebijakan Ukuran Kapal Dalam Definisi Nelayan Kecil, dan; (vii) Kelas dan Potensi Konflik Nelayan di Kota Kupang (Studi Kasus Nelayan di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur).

Dengan diterbitkannya jurnal ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang ada kepada masyarakat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perikanan dan kelautan. Saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan guna kesempurnaan penerbitan jurnal ini dimasa mendatang.

Redaksi

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Volume 9 Nomor 2, Tahun 2019

DAFTAR ISI	Halaman
KATA PENGANTAR	i
UCAPAN TERIMA KASIH	ii
DAFTAR ISI	iii
PERENCANAAN MODEL DAN STRATEGI PENGELOLAAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) BIAK DI KABUPATEN BIAK NUMFOR, PAPUA <i>Oleh : Umari Hasan, Harianto dan Catur Sarwanto</i>	79 - 92
EFEKTIVITAS ZONASI DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN KARANG DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN SELAT DAMPIER, RAJA AMPAT <i>Oleh : Frensy D Hukom, Fredinad Yulianda, D.G. Bengen dan M.M. Kamal</i>	93 - 103
STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERIKANAN TANGKAP DI KABUPATEN BUTON SELATAN <i>Oleh : Retno Widihastuti dan Armen Zulham</i>	105 - 115
KONTRIBUSI <i>PAYMENT FOR ENVIRONMENT SERVICES</i> (PES) TERHADAP KEBERLANJUTAN WISATA SELAM DI KAWASAN KONSERVASI LAUT GILI MATRA <i>Oleh : Lalu Solihin, Tridoyo Kusumastanto, Akhmad Fauzi dan Fredinan Yulianda</i>	117 - 128
EVALUASI SISTEM BUDIDAYA LELE: ASPEK PRODUKSI DAN STRATEGI PENGEMBANGANNYA (Studi Kasus: Pembudidaya Lele Kabupaten Tangerang) <i>Oleh : Nur Fauziah, Kukuh Nirmala, Eddy Supriyono dan Yani Hadiroseyani</i>	129 - 142
KAJIAN HUKUM KEBIJAKAN UKURAN KAPAL DALAM DEFINISI NELAYAN KECIL <i>Oleh : Radityo Pramoda dan Tenny Apriliani</i>	143 - 156
KELAS DAN POTENSI KONFLIK NELAYAN DI KOTA KUPANG (Studi Kasus Nelayan di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur) <i>Oleh : Petrus Kobesi, Rilus A. Kinseng dan Satyawan Sunito</i>	157 - 170

UCAPAN TERIMA KASIH

Dewan Redaksi Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (JKSEKP) menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar - besarnya kepada para Mitra Bebestari yang telah berpartisipasi dalam menelaah naskah yang diterbitkan di jurnal ilmiah ini, sehingga jurnal ini dapat terbit tepat pada waktunya. Mitra Bebestari yang berpartisipasi dalam terbitan Volume 9 Nomor 2, Desember 2019 adalah:

1. Dr. Syahyuti (*Sosiologi Pertanian - Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*)
2. Dr. Najamuddin, ST, M.Si (*Ilmu Kelautan & Lingkungan - Universitas Khairun*)
3. Zulhamsyah Imran, PhD (*Sistem Ekologi Sosial - Institut Pertanian Bogor*)
4. Prof. Dra. Indah Susilowati, M.Sc. Ph.D (*Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan - Universitas Diponegoro*)
5. Dr. Umi Muawanah (*Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*)
6. Prof. Dr. Zuzy Anna (*Ekonomi Sumber Daya Alam - Universitas Padjadjaran*)
7. Prof. Dr. Fatuchri Sukadi (*Analisis Kebijakan Perikanan - Anggota Dewan Pembina Flora Fauna Taman Mini Indonesia Indah*)
8. Andi Kurniawan S.Pi, M.Eng, D.Sc (*Teknologi Hasil Perikanan - Universitas Brawijaya*)
9. Dr. Achmad Zamroni (*Pengelolaan Wilayah Pesisir - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*)
10. Drs. Kusnadi, M.A (*Antropologi Maritim - Universitas Jember*)
11. Dr. Ir. Djuara P. Lubis, MS (*Lingkungan Perairan dan Sumberdaya Perikanan - Institut Pertanian Bogor*)

PERENCANAAN MODEL DAN STRATEGI PENGELOLAAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN
TERPADU (SKPT) BIAK DI KABUPATEN BIAK NUMFOR, PAPUA

*Model and Strategy Planning on Integrated Management of Biak
Marine and Fisheries Center (SKPT) in Biak Numfor District, Papua*

Umari Hasan, Harianto dan Catur Sarwanto

ABSTRAK

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) adalah pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu dari hulu ke hilir berbasis kawasan, yang telah dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2016 melalui berbagai kegiatan seperti pembangunan fasilitas usaha, fasilitas pendukung, penyaluran bantuan usaha, dan pelatihan tenaga kerja perikanan. Kawasan SKPT Biak belum beroperasi secara maksimal karena beberapa hal, antara lain belum memiliki model dan strategi pengelolaan kawasan. Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu: 1) menyusun model pengelolaan SKPT Biak; 2) mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengelolaan SKPT Biak; 3) merumuskan alternatif dan prioritas strategi pengelolaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan *Business Model Canvas* (BMC) yang disesuaikan untuk organisasi non-profit, serta analisis *strengths, weaknesses, opportunities, threats* (SWOT) yang diintegrasikan dengan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Hasil analisis pada penelitian ini adalah model pengelolaan SKPT Biak, yang memiliki tiga segmen yang dinilai relatif lebih penting dan sangat mempengaruhi kesuksesan segmen lainnya yaitu: Proporsi Nilai, Aktifitas Kunci, dan Arus Pendapatan. Prioritas strategi yang dirumuskan, yaitu: (1) Mengoptimalkan semua sumber daya produksi untuk menciptakan nilai yang dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan mitra, serta untuk menarik pelanggan dan investor baru; (2) Melakukan promosi peluang investasi dan kerja sama, serta mengusulkan alokasi bantuan dalam rangka mengoptimalkan seluruh aktifitas dalam kawasan SKPT Biak; (3) Penyusunan peraturan penerapan retribusi, sistem pembayaran, pengelolaan, dan sanksi dengan melibatkan Pemerintah, asosiasi usaha, dan instansi terkait lainnya; serta (4) Menyusun perencanaan seluruh kegiatan dan anggaran dalam rangka optimalisasi pengelolaan kawasan SKPT Biak, untuk diusulkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kementerian terkait, serta Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Swasta (BUMN/BUMS) penyalur *Corporate Social Responsibility/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan* (CSR/PKBL).

Kata Kunci: bisnis perikanan; SKPT Biak; model pengelolaan; strategi; kawasan perikanan; pengelolaan terpadu

ABSTRACT

Integrated Marine and Fisheries Center (SKPT) is an integrated marine and fisheries business center from the upstream to downstream based on area, which has been developed by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries since 2016 through various activities, such as the construction of business facilities, supporting facilities, business support distribution, and training for fisheries labors. The SKPT Biak area has not yet operated optimally due to several factors, including the lack of area management model and strategy. This research has three main objectives namely: 1) develop a SKPT Biak management model; 2) identify internal and external factors that affect the management of SKPT Biak; 3) formulate alternative and priority management strategies. The method used in this research is descriptive method using Business Model Canvas (BMC) which is adjusted for non-profit organizations, as well as strengths, weaknesses, opportunities, threats (SWOT) analysis which is integrated with the Analytical Hierarchy Process (AHP). The results of the analysis in this study is management model of SKPT Biak, that the segments that are considered relatively more important and greatly affect the success of other segments, that is: Proportion of Values, Key Activities, and Revenues. Formulated priority strategies are: (1) Optimizing all production resources to create value that can increase customer and partner loyalty, and to attract new customers and investors; (2) Promoting investment opportunities and cooperation, and proposing the allocation of assistance in order to optimize all activities in the SKPT Biak area; (3) Formulation of regulations on user fees, payment systems, management, and sanctions involving the Government, business associations, and other relevant agencies; and (4) Arranging the planning of all activities and budgets in the context of optimizing the management of the Biak SKPT area, to be proposed to the KKP, relevant ministries, as well as BUMN/BUMS channeling CSR /PKBL.

Keywords: fisheries business; SKPT Biak; management model; strategy; fisheries area; integrated management

EFEKTIVITAS ZONASI DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN KARANG DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN SELAT DAMPIER, RAJA AMPAT

The Effectiveness of Zoning in The Management of Reef Fisheries in Marine Protected Area of Dampier Strait, Raja Ampat

Frensy D Hukom, Fredinad Yulianda, D.G. Bengen dan M.M. Kamal

ABSTRAK

Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) ditetapkan untuk berbagai tujuan, termasuk melindungi spesies dan habitat laut, melestarikan keanekaragaman hayati laut, memulihkan stok perikanan, mengelola kegiatan pariwisata, dan meminimalkan konflik di antara beragam pengguna sumber daya. Oleh karena itu, timbul pertanyaan apakah pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Selat Dampier Raja Ampat telah dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang berkelanjutan serta meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat yang ada di kawasan tersebut. Analisis penerapan zonasi dalam pengelolaan kawasan konservasi laut Selat Dampier diukur dengan memetakan kelimpahan dan biomasa ikan karang, memotret persepsi nelayan tentang zonasi serta menilai tingkat kepatuhan nelayan pada batas-batas zonasi. Penelitian ini dilakukan di kawasan konservasi Selat Dampier, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, antara November 2016 dan Oktober 2017. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode survei, termasuk data primer dan sekunder. Metode transek sabuk, dilakukan pada kedalaman 3 m, digunakan untuk mengukur kelimpahan dan biomasa ikan. Responden adalah nelayan terumbu karang yang tinggal di Desa Saonek, Desa Yenbuba, Desa Friwen dan Desa Arborek. Data sekunder diperoleh dari beberapa sumber (Dinas Perikanan Kabupaten, BPS, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian). Data dianalisis secara deskriptif dan metode tabulasi silang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem zonasi pada pengelolaan kawasan konservasi di perairan Selat Dampier, Raja Ampat dapat dikatakan cukup efektif terlihat dari kelimpahan ikan dan biomasa yang cukup tinggi pada zona inti dan zona wisata (sebagai Daerah Perlindungan Laut/ DPL) dimana pada kedua zona tersebut nilainya 1.5 sampai 2 kali dibandingkan dengan zona perikanan (Non DPL). Rata-rata tingkat kesadaran dan kepatuhan nelayan untuk tidak melakukan penangkapan ikan di daerah zona inti dan zona wisata cukup tinggi yakni 95%. Persepsi sebagian besar nelayan mengekspresikan kesadaran lingkungan dan pengetahuan yang baik tentang kawasan konservasi.

Kata Kunci: efektivitas; perikanan karang; Raja Ampat; zonasi

ABSTRACT

Marine Protected Areas (MPAs) are defined for various purposes, including to protect marine species and habitats, to conserve marine biodiversity, to restore fishery stocks, to manage tourism activities, and to minimize conflicts among diverse resource users. Therefore, question arises whether there has been effective management of the Marine protected Area in the Raja Ampat Dampier Strait in order to achieve sustainable results and improve the socio-economic status of its society. Analysis of the zoning system in the management of the Dampier Strait was measured by mapping the abundance and biomass of reef fish, capturing fishers' perception towards zoning and assessing the level of fishers' compliance at zoning boundaries. This research was conducted in the Dampier Strait conservation area, Raja Ampat District, West Papua Province, from November 2016 to October 2017. Primary and secondary data were collected through surveys. The belt transect method was carried out to a depth of 3 m to measure the abundance and biomass of fish. Primary data were collected from coral reef fishers living in Saonek Village, Yenbuba Village, Friwen Village and Arborek Village. Secondary data were taken from several sources (District Fisheries Service, BPS, scientific journals, and research reports). Data were analyzed descriptively and cross tabulated method. The results showed that the zoning system was effective to manage the conservation areas in the Dampier Strait waters, Raja Ampat since there are abundance of fish and high biomass in the core zone and tourist zone (as Marine Protected Areas) with 1.5 to 2 times amount compared with the fisheries zone (Non DPL). The average level of awareness and average compliance of fishers to prevent themselves from fishing activities in the core zone and tourism zone is 95%. Most fishers express high environmental awareness and good knowledge toward conservation areas.

Keywords: effectiveness; reef fisheries; Raja Ampat; zoning

STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERIKANAN TANGKAP DI KABUPATEN BUTON SELATAN

Strategy of Capture Fisheries Industry Development in South Buton District

Retno Widiastuti dan Armen Zulham

ABSTRAK

Potensi perikanan tangkap Kabupaten Buton Selatan cukup besar meliputi jenis ikan pelagis besar dan kecil, serta demersal. Kabupaten Buton Selatan yang menjadi bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 714 (WPP RI 714), secara rata-rata mampu berkontribusi melalui produksi perikanan tangkap dengan jumlah rata-rata 35,452,429kg/tahun. Angka tersebut adalah tidak termasuk pelagis besar tuna dan cakalang (KepMenKP No.50, 2017). Kenyataannya pada tahun 2014 kontribusi Kabupaten Buton Selatan hanya sejumlah 7.308.000 kg/tahun (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Selatan, 2015). Pertimbangan karakteristik inilah, menjadikan Kabupaten Buton Selatan dipilih menjadi lokasi penelitian. Penelitian bertujuan untuk memberikan masukan berupa strategi dalam mengembangkan industri perikanan tangkap di Kabupaten Buton Selatan. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2016. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari informasi yang terkumpul, kemudian dikelompokkan, disusun, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data kuantitatif dianalisis dalam bentuk statistik sederhana, sedangkan untuk mengidentifikasi peluang pengembangan daerah dilakukan identifikasi *USG (Urgency, Seriousness and Growth)*, *SWOT (Strength-Weakness Opportunity and Threat)*, dan *QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix)*. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tangkap di Kabupaten Buton Selatan belum optimal, oleh karenanya diperlukan kebijakan yang berbasis pada permasalahan kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap yang mendukung program pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Adapun implikasi kebijakan yang diperlukan pemerintah meliputi: a) Mempromosikan pemanfaatan sumberdaya perairan kepada investor dengan peluang dibangunnya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI); b) Memanfaatkan seluruh armada dan alat tangkap untuk memanfaatkan PPI yang akan dibangun; c) Mempromosikan PSKPT ke investor; serta d) Mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan sarana dan prasarana serta potensi perikanan tangkap.

Kata Kunci: potensi; perikanan tangkap; strategi pengembangan; pemanfaatan; sarana prasarana Buton Selatan

ABSTRACT

*The potential of capture fisheries in South Buton District is quite large, including large and small pelagic fish species, and demersal fish. South Buton District which is part of the Fisheries Management Region of the Republic of Indonesia 714 (WPP RI 714) on average is able to contribute through capture fisheries production with an average number of 35.452,429kg / year. This number is not including the large pelagic tuna and skipjack. In fact, in 2014 production was only 7,308,000 kg / year (South Buton District Marine and Fisheries Data, 2014). Consider this characteristic, making South Buton District was chosen as the research location. The research aims to give input a strategy in developing the capture fisheries industry in South Buton District. The study was conducted in October 2016. Data collected are primary and secondary data. Primary data collection is done by using interview and observation techniques. Data analysis was performed descriptively qualitative and quantitative. Qualitative data were obtained from information collected, then grouped, arranged, and analyzed descriptively qualitatively. Quantitative data were analyzed in the form of simple statistics, while to identify opportunities for regional development *USG (Urgency, Seriousness and Growth) identification, SWOT (Strength-Weakness Opportunity and Threat), and QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix)*. The results of the analysis show that the utilization of the potential of capture fisheries in South Buton District is not optimal, therefore a policy that is based on the problem of the lack of capture fisheries facilities and infrastructure that supports the development of the marine and fisheries sector is needed. The policy implications required by the government include: a) Promoting the use of aquatic resources to investors with the opportunity to develop PPIs; b) Utilizing the entire fleet and fishing gear to utilize the Fish Landing Base to be built; c) Promoting PSKPT to investors; and d) Prepare Human Resources (HR) in the management of facilities and infrastructure as well as the potential of capture fisheries.*

Keywords: *potency; capture fisheries; development strategy; utilization; infrastructure of Buton District*

KONTRIBUSI *PAYMENT FOR ENVIRONMENT SERVICES* (PES) TERHADAP KEBERLANJUTAN WISATA SELAM DI KAWASAN KONSERVASI LAUT GILI MATRA

PES (Payment For Environment Services) Contribution for Sustainability of Scuba Diving Tourism in Gili Matra Conservation Area

Lalu Solihin, Tridoyo Kusumastanto, Akhmad Fauzi dan Fredinan Yulianda

ABSTRAK

Kawasan konservasi yang digunakan sebagai lokasi wisata selam, berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem sumberdaya terumbu karang yang ada disekitarnya. Wisatawan yang memperoleh kepuasan ketika menikmati keindahan alam laut, maka mereka harus memberikan kontribusi balik terhadap lingkungan. Dana kontribusi tersebut akan dipergunakan untuk biaya perbaikan kualitas lingkungan yang rusak akibat aktivitas wisatawan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar kontribusi PES terhadap keberlanjutan ekosistem terumbu karang sebagai penunjang kegiatan wisata selam, dan bagaimana mekanisme pungutan PES yang efisien dan optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, iuran PES dari pengguna jasa wisata selam berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekosistem terumbu karang apabila iuran tersebut dikelola secara baik dan benar. Dalam skema pungutan PES yang diusulkan pada artikel ini adalah dengan melibatkan seluruh stakeholder yang berkepentingan terhadap kawasan konservasi ke dalam lembaga pengelola dana PES.

Kata,Kunci: *payment for environment services* (PES); ekosistem terumbu karang; wisata selam; kawasan konservasi; Gili Matra

ABSTRACT

Conservation areas which are utilized as diving tourism location, have potentials to cause damages of the surrounding thicks of coral reef ecosystem resources. Tourists who have gained satisfaction when enjoying the beauty of the nature "under the sea", hence they must provide reciprocal contributions for the environment. The contribution funds will be used for costs of damaged environmental quality restoration due to tourist activities. Therefore, the purpose of this research is to analyze the magnitude of PES' contribution to the sustainability of coral reef ecosystems as a mean to support diving tourism activities, and how the collection mechanism of PES is being efficient and optimal. Research results indicated that, PES fees from users of diving tourism services have significant effects on growth of coral reef ecosystem if the fees are managed properly and correctly. In the collection scheme of PES which is proposed in this article is by involving the entire stakeholders who have importance to the conservation areas into funding management institution for PES.

Keywords: *payment for environment services (PES), coral reef ecosystem, scuba dive, conservation area, Gili Matra*

EVALUASI SISTIM BUDIDAYA LELE: ASPEK PRODUKSI DAN STRATEGI PENGEMBANGANNYA (Studi Kasus: Pembudidaya Lele Kabupaten Tangerang)

Evaluation of Catfish Farming System: Production Aspect and Developmental Strategy, (Case studies: Catfish Farmers in Tangerang Regency)

Nur Fauziah, Kukuh Nirmala, Eddy Supriyono dan Yani Hadiroseyani

ABSTRAK

Budi daya lele merupakan komponen penting dalam sektor usaha perikanan air tawar di Kabupaten Tangerang dengan kontribusi lebih dari 70% (senilai Rp109,5 milyar) pada tahun 2018. Meskipun demikian, diperlukan peningkatan produksidimasayangkanan datang dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan pasar. Peningkatan tersebut perlu didukung oleh informasi potensi budi daya serta strategi pengembangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai karakteristik kegiatan

ABSTRACT

Catfish farming is an important element in the freshwater fisheries business in Tangerang Regency that contributes more than 70 percent of total production (Rp. 109.5 billion) in 2018. However, it is necessary to increase the number of future production to anticipate the market demand. This increasing production should be supported with information on potential aquaculture and its development strategies. This study aims to describe the characteristics of aquaculture activities as well as to formulate the development strategies of catfish

budi daya serta merumuskan strategi pengembangan budi daya lele di Kabupaten Tangerang. Pengambilan data dilakukan melalui survei dengan kuesioner terstruktur selama bulan Oktober 2018 hingga Januari 2019. Metode analisis data terdiri atas analisis deskriptif dan analisis SWOT. Alternatif strategi yang diprioritaskan berdasarkan hasil analisis SWOT yaitu strategi SO (*Strength-Opportunities*) yang berada pada kuadran I. Peningkatan keterampilan, ketersediaan benih berkualitas, dan penerapan teknologi informasi diharapkan mampu mendukung efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan usaha. Alternatif strategi yang disarankan yaitu: (1) Dinas terkait memfasilitasi pelatihan teknologi intensifikasi budi daya yang ramah lingkungan, serta penyediaan benih unggul; dan (2) Perluasan wilayah pemasaran dan pengembangan usaha dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta penguatan kerjasama antar pembudidaya.

Kata,Kunci: lele; karakteristik budi daya; SWOT; strategi

farming in Tangerang Regency. Data were collected by structured questionnaires from October 2018 to January 2019. Data were analyzed using descriptive and SWOT analysis. Result of SWOT analysis suggests that SO (Strength-Opportunities), which was in quadrant 1, should be prioritized. Skill improvement, availability of good fingerling, and application of information technology were expected to encourage its productivity, efficiency, and business sustainability. The study suggests following recommendation: (1) Associated agencies facilitate training of green intensification on aquaculture technology and supply superior fingerlings; and (2) Market expansion and business development using information technology, and the intense cooperation among farmers.

Keywords: catfish; production; aquaculture characteristic; SWOT; developmental strategy

KAJIAN HUKUM KEBIJAKAN UKURAN KAPAL DALAM DEFINISI NELAYAN KECIL

A Legal Study on Vessel Size Policy Within The Definition of Small Scale Fisher

Radityo Pramoda dan Tenny Apriliani

ABSTRAK

Definisi nelayan kecil sebagai sebuah kebijakan publik memiliki arti penting, ketika dihadapkan pada keinginan pemerintah mengelola wilayah perikanan nusantara secara baik dan berkeadilan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji ukuran kapal yang tepat dalam definisi nelayan kecil. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran kapal yang paling tepat digunakan nelayan kecil adalah ≤ 5 Gross Tonnage/GT. Adanya perbedaan satuan volume kapal untuk definisi nelayan kecil dalam UU No. 45/2009 dan UU No. 7/2016, juga memberikan dampak terhadap: 1) rujukan UU yang harus diacu; 2) kewenangan perizinan kapal (dikaitkan UU No. 23/2014); 3) wilayah penangkapan ikan; 4) kemampuan memperoleh hasil tangkapan (teknologi); 5) tata administrasi pencatatan kapal. Rekomendasi yang harus diupayakan pemerintah ialah menyamakan ukuran kapal dalam salah satu rumusan teks definisi nelayan kecil dengan merivisi UU No. 45/2009 atau UU No. 7/2016.

Kata,Kunci: kebijakan; ukuran kapal; definisi; nelayan kecil

ABSTRACT

The definition of small scale fisher plays a vital role in public policy, especially as the government attempts to establish a well and fairway managing its national fishery area. The purpose of this study is to determine the appropriate vessel size for small fisher definition. Data were analyzed using a normative juridical method and were described in a narrative description. The results suggest that the most appropriate vessel size for the small scale fishers is less than 5 Gross Tonnage/GT. The difference in unit usage between Constitution No. 45/2009 and Constitution No. 7/2016, has also made impacts towards several aspects, such as: 1) which constitution to refer to; 2) vessel authorization licensing (refer to Constitution No. 23/2014); 3) fishing area; 4) ability to catch fishes (technology); 5) administrative procedures for vessels' recording. Therefore, based on these findings, this study recommends the government to equalize the size of the vessel in at least one of the text that defines small fisher, either Constitution No. 45/2009 or Constitution No. 7/2016.

Keywords: policy; vessel size; definition; small fishers

KELAS DAN POTENSI KONFLIK NELAYAN DI KOTA KUPANG (Studi Kasus Nelayan Di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur)

Class and Potential Conflict of Fishers in Kupang City (Case Study of Fishers in Kelapa Lima sub-district, Kupang City, East Nusa Tenggara)

Petrus Kobesi, Rilus A. Kinseng dan Satyawan Sunito

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam melimpah; salah satunya perikanan tangkap. Potensi ini didukung oleh luas perairan mencapai 200.000 km² dan letak yang sangat strategis. Hal yang sama juga dengan Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur memiliki kekayaan alam laut yang melimpah sehingga masyarakat pesisir pantai memilih melaut sebagai sumber penghidupan ekonomi keluarga. Dalam proses penangkapan ikan oleh nelayan; seringkali memperlihatkan cara-cara yang bersifat eksploitasi sehingga berpotensi konflik. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui formasi kelas, potensi konflik dan pengelolaan konflik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan menggunakan paradigma kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan teknologi penangkapan mengakibatkan terbentuknya kelas sosial nelayan. Terdapat 4 kelas nelayan di Kecamatan Kelapa Lima yakni nelayan buruh, nelayan kecil, nelayan menengah dan nelayan besar. Adapun potensi konflik yang mengemuka, yakni konflik yang dipicu oleh hubungan produksi antara pemilik perahu dengan nelayan buruh. Konflik yang dipicu oleh cara produksi dan penggunaan alat penangkapan antara bagan apung dengan bagan tanam. Konflik yang dipicu oleh tumpang tindih wilayah penangkapan antara nelayan *purse seine* dengan nelayan pukat. Pengelolaan konflik dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki otoritas sebagai mediator seperti pemerintah, tokoh agama dan pemilik perahu..

Kata,Kunci: formasi kelas; konflik; perikanan; nelayan; Kupang

ABSTRACT

Indonesia is blessed with rich natural resources; one of which is capture fisheries. This potential is supported by an area of water reaching 200,000 km² and a very strategic location. The same thing also with Kelapa Lima Subdistrict, Kupang City, East Nusa Tenggara has abundant natural resources of the sea so that coastal communities choose to go to sea as a source of family economic livelihood. In the process of fishing by fishers; often shows ways that are exploitative so that the potential for conflict. The purpose of this study is to determine class formation, potential conflicts and conflict management. The method used in this study is a qualitative method using a critical paradigm. The results showed that changes in fishing technology resulted in the formation of a social class of fishers. There are 4 classes of fishers in Kelapa Lima Sub-district namely labor fishers, small fishers, medium fishers and big fishers classes. The potential for conflicts that arise are, the potential for conflict triggered by the production relations between boat owners and labor fishers. Conflict triggered by the method of production and use of capture equipment between floating and planting charts. Conflict triggered by overlapping fishing areas between purse seine fishers and trawlers. Conflict management is carried out by various parties who have authority as mediators such as the government, religious leaders and boat owners.

Keywords: class formation; conflict; fishery; fishers; Kupang

(Indeks Pengarang)
(Author Index)

Apriliani, Tenny	143 - 156
Bengen, D.G.	93 - 103
Fauzi, Akhmad	117 - 128
Fauziah, Nur	129 - 142
Hadiroseyani, Yani	129 - 142
Hariato	79 - 92
Hasan, Umari	79 - 92
Hukom, Frenslly D.	93 - 103
Kamal, M.M.	93 - 103
Kinseng, Rilus A.	157 - 170
Kobesi, Petrus	157 - 170
Kusumastanto, Tridoyo	117 - 128
Nirmala, Kukuh	129 - 142
Pramoda, Radityo	143 - 156
Sarwanto, Catur	79 - 92
Solihin, Lalu	117 - 128
Sunito, Satyawan	157 - 170
Supriyono, Eddy	129 - 142
Widihastuti, Retno	105 - 115
Yulianda, Fredinad	93 - 103; 117 - 128
Zulham, Armen	105 - 115

(Indeks Subjek)
(Subject Index)

Bisnis Perikanan	79 - 92
Definisi	143 - 156
Efektivitas	93 - 103
Ekosistem Terumbu Karang	117 - 128
Formasi Kelas	157 - 170
Gili Matra	117 - 128
Karakteristik Budi Daya	129 - 142
Kawasan Konservasi	117 - 128
Kawasan Perikanan	79 - 92
Kebijakan	143 - 156
Konflik	157 - 170
Kupang	157 - 170
Lele	129 - 142
Model Pengelolaan	79 - 92
Nelayan	157 - 170
Nelayan Kecil	143 - 156
<i>Payment for Environment Services (PES)</i>	117 - 128
Pemanfaatan	105 - 115
Pengelolaan Terpadu	79 - 92
Perikanan	157 - 170
Perikanan Karang	93 - 103
Perikanan Tangkap	105 - 115
Potensi	105 - 115
Raja Ampat	93 - 103
Sarana Prasarana Buton Selatan	105 - 115
SKPT Biak	79 - 92
Strategi	79-92; 129-142
Strategi Pengembanagn	105 - 115
SWOT	129 - 142
Ukuran Kapal	143 - 156
Wisata Selam	117 - 128
Zonasi	93 - 103

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

PEDOMAN BAGI PENULIS

Misi publikasi ini adalah membahas isu aktual kebijakan kelautan dan perikanan dalam bentuk gagasan, dialog maupun polemik. Sesuai dengan misi tersebut, maka naskah harus mengandung pembahasan tentang isu analisis kebijakan kelautan dan perikanan yang aktual.

Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan merupakan jurnal ilmiah yang berisi naskah hasil riset, review, analisis, yang difokuskan untuk formulasi kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang cakupannya meliputi: Dinamika Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan, Sistem Usaha, Pemasaran dan Perdagangan, Sosial dan Kelembagaan, Hukum dan Politik.

Naskah yang diterima yaitu karya tulis yang merupakan karya asli dan belum pernah diterbitkan Dipublikasi lainnya.

UMUM

Kertas : HVS A4 (21,0 cm x 29,7 cm)

Margin : Kiri 3 cm
Bawah, Kanan dan Atas 2 cm

Huruf : Arial, 11 pt, hitam, 1,5 spasi, ketik dalam Bahasa Indonesia (kecuali abstrak) atau Bahasa Inggris yang baik dan benar, tidak diperkenankan menggunakan singkatan yang tidak umum.

Struktur : Judul, Abstrak, Pendahuluan, Pokok Pembahasan, Sintesa, Penutup, Ucapan Terima Kasih dan Daftar Pustaka.

Naskah dikirim secara *Online* di alamat web [http://ejournal-balitbang.kkp.go.id index.php/jkse](http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse).

Alamat Redaksi Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Gedung BRSDM KP I, Komplek Bina Samudera, Jl. Pasir Putih I Ancol Timur, Jakarta 14430, telp (021) 64700924, fax (021) 64711583, *Email*: kebijakan.bosek@gmail.com.

Judul

Judul harus ditulis secara ringkas (maksimal 15 kata), tetapi cukup informatif untuk menggambarkan isi tulisan. Ditulis dalam Bahasa Indonesia dan di bawahnya dalam Bahasa Inggris, menggunakan huruf Arial, kapital Bold, 12 pt, center.

Penulis dan institusi

Penulis dan Institusinya ditulis berurutan di bawah judul. Nama penulis ditulis dengan huruf Arial, kapital bold, 10 pt, center. Institusi asal (alamat, nomor telepon, nomor faksimil, serta e-mail) ditulis dengan huruf Arial, kapital dan kecil, 10 pt, center.

Abstrak

Ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tidak lebih dari 250 kata dan hanya satu paragraf. Spasi antar baris kalimat 1.0. Abstrak memberikan informasi singkat namun jelas tentang alasan penelitian dilakukan, lokasi dan waktu penelitian, tujuan yang ingin dicapai, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh serta kesimpulan. ditulis dengan huruf Arial, 10 pt.

Kata Kunci

Ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, terdiri dari 4 sampai 6 kata tulis di bawah abstrak. Pada kata kunci diberikan font bold arial 10 pt. Isi kata kunci tidak di bold, dan pada akhir kata kunci tidak diberi tanda titik (.). Pemisah setiap kata kunci menggunakan titik koma (;) sesuai dengan templete jurnal.

Pendahuluan

Pendahuluan sebaiknya dimulai dengan menjelaskan latar belakang penelitian, arti penting penelitian, pernyataan masalah, waktu dan lokasi penelitian, metodologi yang digunakan, dan tujuan penelitian.

Pokok Pembahasan 1 s.d n

Pokok bahasan n (minimal terdapat 2 pokok bahasan). Membahas singkat teori pendukung berdasarkan kajian pustaka atau bahan referensi yang resmi. Pada dasarnya pokok pembahasan membahas permasalahan dengan pemecahan masalah yang dikaji yang dapat dibantu dengan faktor pendukung dan penghambat.

Sintesa Pokok Pembahasan 1 s.d n

Sintesa diuraikan secara ringkas dan jelas mengacu pada pokok-pokok pembahasan serta kemampuan mengartikulasikan temuan. Sintesa yang menjawab pada setiap pokok pembahasan,

ditulis secara singkat dan jelas dalam beberapa kalimat pada intinya menegaskan apakah tujuan penelitian ini sudah tercapai atau masih ada hal-hal yang belum dicapai. Jika belum, jelaskan apa penyebabnya. Jumlah sintesa sesuai jumlah pokok pembahasan yang telah dibahas sebelumnya.

Penutup

Bagian penutup laporan penelitian merupakan bagian untuk mengakhiri laporan penelitian. Berisi simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, penegasan kembali hal-hal yang telah diuraikan/dijabarkan pada bagian pokok pembahasan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan Terima Kasih ditulis dengan formal, ucapan diberikan pihak tertentu, misalnya Sponsor penelitian, nama yang benar-benar terlibat dalam pelaksanaan penelitian dan ucapan tidak terlalu berlebihan.

Daftar Pustaka

Referensi hendaknya dari sumber yang jelas dan terpercaya. Setiap referensi yang tercantum dalam daftar pustaka harus dikutip (disitir) pada naskah dan sebaliknya setiap kutipan harus tercantum dalam daftar pustaka. Acuan penulisan sitasi menggunakan *APA citations style (American Psychological Association) – 6th edition*. APA merupakan “sistem penulis – Tahun”. APA memiliki beberapa edisi penulisan sitasi manual, yang tujuannya adalah untuk membantu penulis dalam persiapan naskah.

Sitasi pada teks

Penulis Tunggal. Menurut Zamroni (2018) beberapa aksi kolaboratif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diambil untuk meningkatkan diversifikasi rumput laut untuk produk bernilai tambah. **Atau**, beberapa aksi kolaboratif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diambil untuk meningkatkan diversifikasi rumput laut untuk produk bernilai tambah (Zamroni, 2018).

2 (dua) Penulis. Dalam Zamroni dan Istiana (2017) konsep kelembagaan bisnis yang mengutamakan partisipasi masyarakat masih menjadi pilihan utama dalam mengelola usaha perikanan “satu pintu” di Desa Laikang. **Atau**, konsep kelembagaan bisnis yang mengutamakan partisipasi masyarakat masih menjadi pilihan utama dalam mengelola usaha perikanan “satu pintu” di Desa Laikang (Zamroni & Istiana, 2017).

Tiga, empat, atau lima penulis. Cantumkan setiap penulis untuk pertama kali sitasi pada teks dituliskan. Setelah itu, kutip hanya nama belakang yang pertama penulis diikuti oleh "*et al. atau et al.,*"

Contoh:

Penulisan sitasi pertama. Koeshendrajana, Mira, Anna, Nugroho, Muawanah, & Dewitasari (2018) Menemukan bahwa...

Penulisan kedua. Koeshendrajana *et al.* (2018) atau Koeshendrajana *et al.*, 2018.

Enam atau lebih penulis. Sitasi hanya pada nama terakhir penulis pertama, kemudian di ikuti dengan "*et al. atau et al.,*"

Mohon sumber berupa Undang-undang, Peraturan pemerintah, Surat Keputusan dan sebagainya agar dimasukkan kedalam daftar pustaka.

Dicantumkan dalam naskah bila ada pengutipan dari sumber lain. Proporsi daftar pustaka yang diacu yaitu 80% merupakan rujukan primer dan merupakan terbitan 5 tahun terakhir. Tuliskan hanya pustaka yang dirujuk dalam makalah saja. Hindari pustaka yang bersumber pada majalah, koran, atau media lainnya yang non-ilmiah. Minimal daftar pustaka 25. Disusun berdasarkan abjad.

Contoh Penulisan Buku:

Nama Belakang Penulis, Inisial Pertama. (Tahun Publikasi). *Judul*. Kota, Singkatan Negara: Penerbit.

Zulham, A., Subaryono & Mahulette, R.T. (2017). Rekomendasi Pengembangan Perikanan Tangkap di Ternate dan Sekitarnya. *Pusat Riset Perikanan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan*. Jakarta, ID: PT Rajagrafindo Persada.

Contoh Buku Elektronik (e-book):

Carruthers, W. (Ed.) (2014). *Histories of Egyptology: Interdisciplinary measures*. Retrieved from <https://www.taylorfrancis.com>

Contoh e-jurnal Ilmiah dengan doi:

Hafsaridewi, R., Khairuddin, B., Ninef, J., Rahadiati, A. & Adimu, H.E. (2018). Pendekatan sistem sosial – ekologi dalam pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikan*, Vol 4(2), 61-74. doi: [10.15578/marina.v4i2.7389](https://doi.org/10.15578/marina.v4i2.7389).

Contoh e-jurnal Ilmiah tanpa doi:

Cohen, A., Medlow, S., Kelk, N., & Hickie, I. (2019). Young people's experiences of mental health care: Implications for the headspace National Youth Mental Health Foundation. *Youth Studies Australia*, 28(1), 13-20. Retrieved from <http://www.acys.info/journal>.

Artikel dari situs internet;

World Wide Fund. (2019). *WWF Kembangkan Upaya Mitigasi Tangkapan Sampingan Penyu di Ujung Tenggara Pulau Sulawesi*. Retrieved from <https://www.wwf.or.id/?72583/WWF-Kembangkan-Upaya-Mitigasi-Tangkapan-Sampingan-Penyu-di-Ujung-Tenggara-Pulau-Sulawesi>.

Contoh Laporan di website:

Tang, Y., & Choo, X. (2009). *Intrinsic divergence for face recognition*. (CTN Technical Report 20090204-001). Centre for Theoretical Neuroscience. Retrieved from <http://compneuro.uwaterloo.ca/cnr/lab>.

Contoh hasil membuat sitasi dan daftar pustaka (bibliografi) menggunakan aplikasi:

(Muliawan & Firdaus, 2018)

Muliawan, I., & Firdaus, M. (2018). Nilai Ekonomi Ekosistem Terumbu Karang di Taman Wisata Perairan Kapoposang, Sulawesi Selatan Economic Value Of Coral Reef Ecosystem In The Kapoposang Marine Park Conservation , South Sulawesi. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, Vol 13(No 1), 133–142.

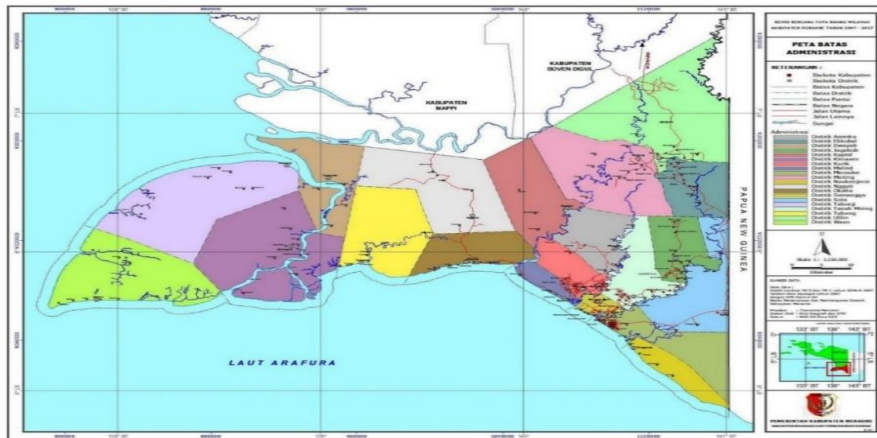
Tabel

Judul tabel (Arial, center, & 11 pt) diberi nomor urut dan ditulis di atas tabel. Tabel ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris, diketik menggunakan program MS-Word dan tidak dalam bentuk JPEG. Sumber dicantumkan di bawah tabel.

Contoh:

Tabel 1. Total Nilai Ekonomi Mangrove di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke.**Table 1. The Total Economic Value Mangrove Coastal Merauke.**

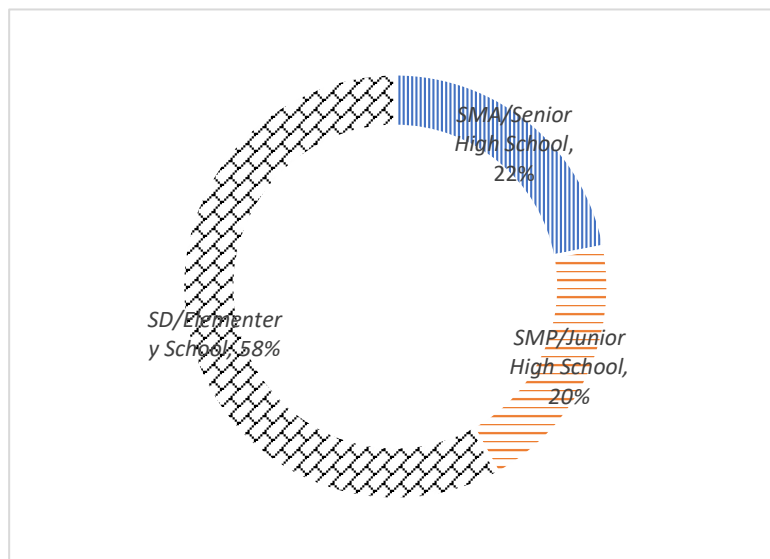
Kategori Nilai Ekonomi/ Category Economic Value	Total Nilai/ Total value (Rp/Tahun)	Total Nilai/ Total value (Rp/Ha/Tahun)
Nilai Guna Langsung/ <i>direct value</i>	121,120,873,947	11,964,919
Nilai Guna Tidak Langsung/ <i>Indirect Value</i>	48,361,817,303,4	4,777,419
Nilai Pewarisan/ <i>Value Inheritance</i>	2,728,107,120	269,496
Total/ Total	177,419,407,910	17,528,367



Gambar 1. Lokasi Pengambilan Data
Figure 1. Location Data Collection

Sumber: www.merauke.go.id/Source: www.merauke.go.id

Catatan Gambar.1: Peta pada gambar harus memiliki keterangan administrative dan bujur koordinat.



Gambar 2. Tingkat Pendidikan Responden
Figure 2. Education Level of Respondents

Sumber: Data Sekunder Widiastuti et al. (2018)/Widiastuti secondary data et al. (2018)

Catatan Gambar.2: Grafik pada gambar harus jelas, diberikan arsir berwarna agar dapat dipahami dengan baik.



BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Gedung BRSDM KP LT. 3
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara
Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924
Web : www.bbrse.kkp.go.id
www.bbrse.net
email : pt.losek@gmail.com

ISSN **2089-6980**

